

MENCEGAH KORUPSI DALAM SKEMA PENSIUN DINI PLTU DI INDONESIA



MULAI

AKHIR

M A S A O P E R A S I O N A L

Pensiun dini PLTU adalah penghentian operasional PLTU sebelum masa akhir operasionalnya (memperpendek masa operasionalnya) demi mengurangi konsumsi batubara yang memproduksi emisi karbon dari PLTU.

PENSIUN
DINI



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption

Cadangan
Batu Bara
33 Miliar
Ton



Harga
Batu Bara
FOB 2022



US\$ 276,58 /Ton

Produksi
Batu Bara
2022
687 Juta
Ton



Ekspor
Batu Bara
2022

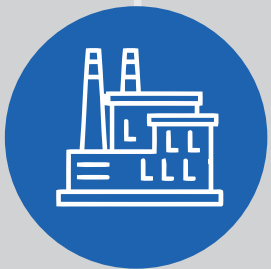


465 Juta
Ton



Total Nilai Ekpor
Batu Bara 2022

US\$ 129 Miliar



Umur PLTU
di Indonesia

10-15 Tahun

Masih Relatif Muda



**CANDUNYA
BATU BARA
INDONESIA**



adalah salah satu

SUMBER KEKAYAAN

mayoritas orang terkaya
di Indonesia

Indonesia sangat tergantung dengan batubara bukan hanya sebagai sumber energi, tapi juga sumber kekayaan bagi *Oligarcoal*, pengusaha batubara yang bertalian erat dengan penguasa politik negeri.

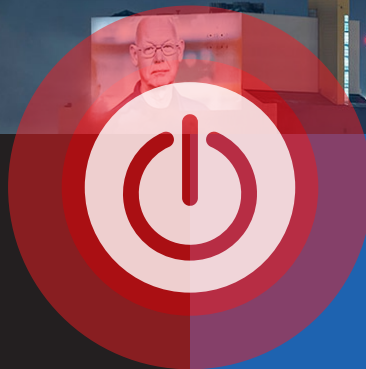
Pelajaran dari Pensiun Dini PLTU di Berbagai Negara

Walaupun sulit & penuh tantangan, efek candu dari batubara pada suatu negara sebagai energi utama sekaligus bahan bakar utama dari PLTU ternyata bisa dihentikan, dan beberapa negara telah membuktikannya..



Di beberapa negara pensiun dini PLTU dapat terjadi karena:

- Tuntutan Pasar.
- PLTU tua, tidak efisien & mahal sehingga kalah bersaing dengan sumber energi lainnya.
- Regulasi ketat dari negara tentang Lingkungan & perubahan Iklim.
- Adanya putusan pengadilan.



Pensiun dini PLTU dapat berupa perubahan peruntukan PLTU (*repurposing coal plant*) berupa:

- ubah sumber energi
- ganti teknologi
- dijual sebagai aset properti

Perubahan peruntukan ini mencegah pemilik PLTU lepas tanggung jawab atas pekerja & lingkungan setelah mendapatkan kompensasi.

Pelajaran dari Pensiun Dini PLTU di Berbagai Negara



Biaya pensiun dini PLTU

- **Skema Sukarela :**
Ditanggung sendiri oleh pemilik PLTU.
- **Skema diwajibkan :**
Ditanggung negara atau pihak ketiga.
- **Skema Mandatori :**
Ditanggung oleh negara atau pihak ketiga dengan persyaratan khusus yang memaksa pemilik PLTU menutup PLTU-nya.

Proses Pensiun dini PLTU sering dirintangi oleh praktek korupsi, dari banyak kasus, pemilik PLTU menyuap atau bekerjasama dengan pejabat negara untuk membuat regulasi yang memperpanjang usia PLTU sehingga bisa terus menguntungkan bisnis pemilik PLTU & pengusaha batu bara



MANDATORY

Berdasarkan Pelajaran dari beberapa negara yang telah berhasil memensiunkan PLTUnya untuk mengurangi batubara sebagai sumber energi utama di negaranya, nampaknya Indonesia bisa mengikuti jejak mereka dengan mengadopsi ***skema mandatory*** untuk dapat mengurangi kecanduannya terhadap batubara yang dikonsumsi oleh PLTU.

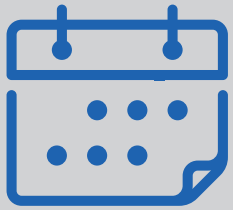
Hal ini disebabkan karena pemilik PLTU tampaknya tidak akan mau memensiunkan PLTUnya secara sukarela tanpa adanya paksaan maupun kompensasi dari negara atau pihak ketiga yang dituangkan melalui aturan hukum yang tegas & konsisten, agar pemilik PLTU benar-benar mau memensiunkan PLTU-nya.

PROSES PENSIUN DINI PLTU DENGAN SKEMA MANDATORY



- (1) Adanya kebijakan penutupan dari eksekutif atau legislatif) tentang pengurangan kapasitas PLTU.
- (2) Adanya proses pemilihan PLTU yang akan dipensiun-dinikan, pemilihan ditentukan berdasar kriteria & persyaratan yang disepakati bersama dapat berupa penunjukan atau tender.
- (3) Adanya skema keuangan yang membantu proses pemensiunan dini PLTU, dapat berupa kompensasi atau subsidi yang disediakan negara atau pihak ketiga. Dapat berupa : *blended capital* (gabungan dana publik & swasta), pasar karbon, atau *debt swaps*.
- (4) Adanya mekanisme pengawasan dalam proses pensiun dini. untuk memastikan komitmen penutupan PLTU terjadi sesuai dengan harapan.

FAKTOR PENGHALANG PEMANSIUNAN DINI PLTU DI INDONESIA



Mayoritas PLTU
di Indonesia
berusia muda



Kontrak jual beli
listrik PLTU
masih panjang



Beberapa PLTU
sudah terapkan
teknologi terkini
(*supercritical &
ultra supercritical*)



Banyak PLTU
dimiliki oleh BUMN
(ada perlakuan
khusus dari negara)



Banyak PLTU
yang dimiliki
oleh pengusaha
yang punya akses
kekuasaan politik
(kewenangan publik)



Pasokan
batu bara
mudah, dekat
dan murah



Keuangan negara
minim biayai skema
pensiun dini PLTU

KENAPA PLTU DI INDONESIA PERLU DIPENSIUN-DINIKAN



**Menekan
laju kenaikan
suhu bumi
di bawah 2° C
Tahun 2100**

**Menjaga Indonesia dari
kerusakan lingkungan
& kesehatan manusia**

*Jika dampak polusi udara
ikut dihitung dalam nilai
keekonomian PLTU maka
harga batu bara bisa jadi
lebih mahal
2-3 X
dari harga sekarang.*



**Mengurangi Subsidi
untuk Batubara yang
membebani APBN**

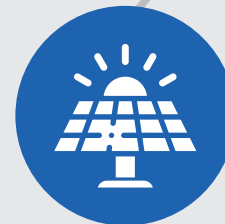
Pada tahun 2022,
Indonesia diperkirakan
memberikan subsidi
untuk batu bara sebesar

**US \$ 58,2 Milyar
Rp 873 T**
(kurs Rp 15.000)



**Mengatasi Masalah
OverSupply Listrik**

Proyek Jokowi membangun Pembangkit Listrik 35 GW (20 GW berupa PLTU) tidak memperhitungkan permintaan listrik sehingga terjadi surplus listrik di wilayah Jawa-Bali (kebanyakan PLTU), harusnya pembangkit itu bisa dipensiunkan karena memang listriknya tidak dipergunakan.



**Bisa beralih
ke Energi Terbarukan
yang lebih murah
daripada Batu Bara**

Biaya Pembangunan
Pembangkit listrik
tenaga surya
(*photovoltaic*)

**USD 0,445 /Kwh
2010
USD 0,049 /Kwh
2022**

Biaya Pembangunan
PLTU

**USD 0,055 /Kwh
2022**

Lantas apa saja resiko korupsi
yang mungkin terjadi di Indonesia
saat proses pemensiunan-dini
PLTU dilakukan, simak lebih
lengkap di laporan kami di:

